

Eksistensi Manusia Dalam Pancasila Perspektif Jean-Paul Sartre

Dimas Rangga Sultan Maulana¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ranggasltn23@gmail.com¹

ABSTRACT

This article discusses human existence in Pancasila. The discussion will focus mainly on the second principle which reads "Just and civilized humanity". In the second principle of Pancasila, the author sees how human existence exists there. Humans can be said to have existence if they act fairly and morally towards others. Based on this, the author tries to see how human existence in Pancasila cannot be separated from the divine aspect, seen from the perspective of Sartre's existentialism which tends to be more atheistic. In compiling this article, the method used was descriptive-analysis. The author explains material obtained from several sources such as books and articles, then the data obtained is processed to achieve an understanding of Pancasila and Sartre's existentialism. In this article, the author tries to explain the second principle of Pancasila and how human existence in it is then seen from the perspective of Sartre's existentialism. Pancasila, which has a theistic character, is seen from the perspective of Sartre's existentialism, which is seen as more atheistic in nature.

Keyword : Human Existence; Pancasila

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai eksistensi manusia dalam Pancasila. Pembahasan akan difokuskan terutama pada sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Pada sila kedua Pancasila tersebut, penulis melihat bagaimana eksistensi manusia ada di situ. Manusia dapat dikatakan mempunyai eksistensi jika manusia tersebut berlaku adil dan bermoral terhadap sesama. Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha melihat bagaimana eksistensi manusia dalam Pancasila tersebut yang tidak bisa terlepas dari aspek ketuhanan dilihat dari sudut pandang eksistensialisme Sartre yang cenderung lebih ateistik. Dalam menyusun artikel ini, metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Penulis memaparkan materi yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku serta artikel kemudian data-data yang diperoleh tersebut diolah agar mencapai suatu pemahaman tentang Pancasila maupun eksistensialisme Sartre. Dalam artikel ini, penulis mencoba memaparkan sila kedua Pancasila serta bagaimana eksistensi manusia didalamnya kemudian dilihat dari sudut pandang eksistensialisme Sartre. Pancasila yang bercorak teistik dilihat dari sudut pandang eksistensialisme Sartre yang dipandang lebih condong bercorak ateistik.

Keyword : Sartre; Eksistensi Manusia; Pancasila

Corresponding Author:

Dimas Rangga Sultan Maulana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia



1. INTRODUCTION

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila. Pancasila menjadi bagian yang sentral di Indonesia, hal itu karena Pancasila menjadi sebuah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pancasila sendiri juga dikatakan menjadi ideologi bangsa. Di dalam kelima sila yang ada, pembahasan mengenai manusia tentu tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Hal ini karena manusia memiliki posisi sentral sebagai objek yang dikaji dalam kelima sila tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, manusia mempunyai arti sebagai makhluk yang memiliki akal budi (mampu menguasai makhluk

lain);insan; orang. Manusia lahir ke dunia dengan keistimewaan. Manusia memiliki akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya. Hal itu menyebabkan manusia memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki sesuatu yang istimewa dibanding makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Dengan akalnya tersebut, manusia juga memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai makhluk hidup.

Eksistensi merupakan bagaimana cara manusia berada di dunia. Tentu cara berada manusia berbeda dengan cara berada benda-benda. Manusia memiliki kesadaran akan keberadaannya sebagai makhluk hidup sedangkan benda-benda tidak memiliki akal, mereka tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya di dunia ini. Karena kesadaran manusia akan keberadaannya tersebut, maka benda-benda diluar menjadi mempunyai makna. Salah satu filsuf yang membahas mengenai bagaimana manusia bereksistensi adalah Jean-Paul Sartre. Eksistensi manusia dalam pandangan Sartre tidak bisa lepas dari Tuhan. Keberadaan Tuhan menurut pandangan Sartre justru menghilangkan keberadaan manusia sebagai individu dengan kebebasan yang mutlak. Kepercayaan kepada Tuhan, dalam pandangan Sartre justru berarti tunduk kepada gereja yang membelenggu eksistensi manusia dengan dogma-dogma agamanya. Hal itu membuat Sartre beranggapan bahwa kebebasan manusia adalah ketika eksistensi Tuhan tiada. Pemikiran Sartre tentang keberadaan manusia tidak terlepas dari pandangannya tentang ada dan berada. Mengenai kebebasan, pemikiran Sartre banyak didasarkan kepada pokok-pokok pemikirannya tentang eksistensi serta kesadaran manusia. Manusia adalah kebebasan itu sendiri, eksistensi manusia mendahului esensi. (Lutfi, 2023)

Dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila, penulis akan lebih menekankan kepada sila kedua yang berbunyi *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, hal ini karena pada sila kedua tersebut penulis melihat bagaimana eksistensi manusia berada pada manusia yang adil dan manusia yang beradab (beretika). Di sini penulis mencoba melihat bagaimana eksistensi manusia yang ada dalam Pancasila jika dilihat dari kacamata Sartre, bagaimana Pancasila yang jika dilihat secara keseluruhan terkesan lebih religius dilihat dari sudut pandang Sartre dengan eksistensi ateistiknya.

2. RESEARCH METHOD

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan cara memaparkan bagaimana eksistensi manusia menurut Sartre serta apa itu Pancasila. Penulis mencoba mencari sumber berupa buku maupun artikel yang dianggap mendukung serta membantu dalam penulisan tulisan ini. Selanjutnya informasi yang didapat akan dianalisis guna menemukan relasi antara Pancasila dengan eksistensi manusia dalam pandangan Sartre. Dalam artikel (Lutfi, 2023) yang berjudul *Eksistensi Manusia dalam Pandangan Jean Paul Sartre dan Sayyed Hossein Nasr*, Menjelaskan bagaimana eksistensi manusia menurut Sartre dan Nasr. Dalam artikel tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa terdapat titik temu sekaligus titik pisah antara eksistensi dalam pandangan Sartre dan Nasr. Titik temu antara pandangan Sartre dan Nasr terletak pada pandangan bahwa manusia sama-sama bereksistensi sebagai subjek dan objek. Sedangkan titik pisah antara pandangan Sartre dan Nasr terlihat sangat jelas terutama pada bagaimana keduanya melihat faktor di luar diri manusia. Baik itu makhluk lain, manusia lain, bahkan Tuhan.

Dalam artikel (Nuraeni et al., 2017) yang berjudul *Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi*, menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai ideologi dalam perspektif global. Dalam artikel tersebut kesimpulan yang disampaikan adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Arus globalisasi yang tidak lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi tidak mungkin dihentikan. Begitu pula dampaknya bagi masyarakat Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Pembudayaan nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengamalan nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat. Dalam artikel (Tambunan, 2016) yang berjudul *Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh ; Filsafat Eksistensialisme Sartre*, menjelaskan bahwa pengaruh eksistensialisme memiliki pengaruh yang cukup besar pada abad ke dua puluh. Artikel itu membahas bagaimana pada masa abad ke dua puluh yang mana pada masa itu telah terjadi perang dunia, manusia menjadi pesimis akan kehidupannya. Eksistensialisme Sartre mempunyai pengaruh yang cukup besar pada masa itu. Hal ini karena eksistensialisme Sartre yang sangat mendukung subjektivitas manusia, ia juga terkenal karena menumbuhkan lahirnya kembali kebebasan berfikir individu. Pandangannya tentang eksistensialisme humanisme membangkitkan kesadaran manusia bahwa manusia itu merupakan makhluk yang berpotensi menjadi dirinya sendiri.

Perbedaan dari artikel ini dengan ketiga artikel sebelumnya terlihat sangat jelas. Pada artikel pertama penulis mencoba mengkomparasikan antara pemikiran Jean Paul Sartre dan Seyyed Hossein Nasr tentang eksistensi manusia. Sedangkan dalam artikel kedua, penulis mencoba melihat bagaimana Eksistensi Pancasila di era globalisasi yang melaju begitu pesat. Pada artikel ketiga, pembahasan lebih difokuskan pada bagaimana peran eksistensialisme pada abad kedua puluh. Bagaimana eksistensialisme Sartre mempunyai pengaruh yang cukup besar terutama pada masyarakat yang pada saat itu cenderung lebih pesimis terhadap kehidupannya. Pada artikel ini

penulis mencoba melihat bagaimana eksistensi manusia dalam Pancasila, terutama pada sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” jika dilihat dari sudut pandangan eksistensi Sartre yang mana hal tersebut tidak ada dalam pembahasan artikel-artikel sebelumnya.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Eksistensi Manusia dalam Pandangan Sartre

Eksistensialisme yang berkembang pada abad kedua puluh di Prancis dan Jerman bukan merupakan suatu akibat dari keadaan atau sebab tertentu, melainkan sebuah respon terhadap apa yang dialami pada masa itu. Eksistensialisme lahir sebagai sebuah respon atas runtuhnya berbagai bangunan yang sebelumnya dianggap stabil di dunia barat. Terjadinya perang dunia pertama menyebabkan hilangnya keyakinan akan berlanjutnya kemajuan peradaban menuju kebenaran dan kebebasan yang telah dimunculkan pada abad kelima pencerahan. Perang dunia pertama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kekuatan yang selama ini stabil diantara bangsa-bangsa besar. Pada saat terjadinya perang dunia pertama, struktur eksternal seperti ekonomi, politik, dan intelektual kekuasaan mulai kehilangan legitimasinya. Para eksistensialis akhirnya kembali pada manusia sebagai pusat filsafat yang sejati dan menjadikan manusia sebagai satu-satunya kekuasaan yang berlegitimasi. (Lavine, 2020)

Pada masa perang dunia pertama sebelum eksistensialisme berkembang saat itu, sistem pemikir cenderung terpaku kepada permasalahan epistemologi esensialisme. Akar pemikiran saat itu berkaca pada rasionalisme dan empirisme spekulatif, dari zaman filsafat pada masa Yunani hingga awal zaman modern. Kondisi tersebut merupakan keadaan berubahnya kondisi sejarah peradaban manusia yang mempengaruhi sejarah pemikiran. Eksistensialisme hadir setelah adanya perdebatan mengenai esensi dan “Being”, apakah merupakan materialisme ontologi atau idealisme metafisik sebagai yang utama. Pemikiran manusia pada masa itu, pada masa perang dunia pertama telah berubah. Yang awal mulanya berpikir secara determinisme menjadi anti determinisme.

Masalah kehidupan manusia merupakan fokus utama dari pemikiran para eksistensialis. Eksistensialisme mempersoalkan keadaan manusia secara keseluruhan bukan hanya esensialis menurut cara berpikirnya yang empiris. Pada akhirnya muncul suatu keadaan yang kompleks dan kacau, hal ini karena eksistensialisme tersebut. Setiap pribadi yang disebut bereksistensi tersebut mempunyai keunikan tersendiri, keunikan masing-masing yang bisa berlawanan antara satu dengan lainnya. Manusia sebagai makhluk yang bereksistensi mempunyai ciri khas masing-masing sebagai seorang individu. Ciri khas tersebut antara lain dalam hal rasio, intuisi, perasaan, kemauan intelektual dan lain sebagainya. Semua ini berhubungan dengan kesadarannya sebagai manusia itu sendiri. Masing-masing manusia tentu ingin menonjolkan eksistensinya serta berusaha agar sudut pandanganya atau pemikirannya mempunyai pengaruh dalam lingkungannya. Kekacauan ini dapat terjadi karena adanya berbagai macam pandangan mengenai manusia. Bila dilihat dari cara beradanya, manusia dapat dibedakan atau dipisahkan dari makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Eksistensi manusia merupakan sesuatu yang khas yang dimiliki manusia. Eksistensi hanya dimiliki manusia, makhluk bernyawa lain seperti hewan tidak mempunyai eksistensi. Dapat dikatakan bahwa eksistensi merupakan ciri khas yang dimiliki oleh manusia yang mempunyai kesadaran akan pribadinya. Meskipun manusia dikatakan sebagai satu-satunya makhluk yang bereksistensi, hal ini tidak membuat manusia hanya berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk yang bereksistensi juga harus melihay keberadaan makhluk lain dalam menjalin hubungannya. Keberadaan manusia didunia ini ada bersama dengan makhluk lain. Meskipun makhluk lain dikatakan tidak bereksistensi, tetapi keberadaan manusia didunia ini tidaklah sendirian. Manusia memiliki cara yang berbeda dengan manusia lain, masing-masing manusia mempunyai cara yang unik dalam bereksistensi. (Tambunan, 2016)

Sartre merupakan sosok yang memiliki pengaruh cukup besar dalam eksistensialisme. Hal ini karena pemikiran filosofisnya cenderung berkaca pada kehidupan nyata serta didukung dengan kepandaiannya sebagai seorang sastrawan. Pemikiran Sartre cenderung lebih dikenal dengan istilah “revolusioner” dalam masa pertengahan abad ke dua puluh. Konsep eksistensi manusia menurut Sartre berhubungan dengan ada dan berada. Sartre mengemukakan istilah *I’etre-en soi* (Berada dalam diri) dan *I’etre-pour soi* (berada untuk diri). Kedua istilah ini digunakan oleh Sartre untuk menunjukkan ada dan berada. Yang dimaksud dengan “berada dalam diri” adalah segala sesuatu yang ada begitu saja tanpa kesadaran serta tidak memiliki makna. Sedangkan yang dimaksud dengan “berada untuk diri” adalah sadar akan eksistensinya, sadar akan dirinya sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang Sartre, manusia merupakan kebebasan. Manusia merupakan makhluk yang eksistensinya mendahului esensi. Manusia dengan segala bentuk kebebasannya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dihindarkan serta tidak dapat dihapuskan. Manusia bertanggungjawab atas pilihannya, bertanggungjawab atas segala tindakannya, serta bertanggungjawab atas segala sesuatu diluar dirinya. Manusia tidak bisa menyerahkan tanggungjawabnya kepada orang lain sebagai pemberi keputusan untuk memenuhi harapannya. Pandangan radikalnya ini tidak terlepas atas sikap ateistiknya.

Manusia dalam pandangan Sartre akan menjadi subjek jika Tuhan itu ada. Hal ini karena manusia jelas akan mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Berdasarkan hal itu, Sartre menekankan untuk meniadakan keberadaan Tuhan karena dianggap sebagai penghalang bagi kebebasan manusia. Dengan demikian, ateisme Sartre

bisa diringkas seperti berikut. “karena sifat kebebasan yang dimiliki manusia, maka Tuhan tidak ada. “ atau “jika Tuhan tidak ada, maka manusia bukan makhluk ciptaan, tetapi proyeksi masa depan yang tidak mungkin terdefiniskan. (Lutfi, 2023)

Sartre hidup pada abad pertengahan di Barat. Pada masa itu, kepercayaan kepada Tuhan dianggap tunduk pada kebijakan gereja yang membelenggu kebebasan manusia dengan dogma-dogma keagamaan. Melihat hal tersebut, Sartre beranggapan bahwa eksistensi Tuhan telah menghilangkan kebebasan manusia. Sartre juga beranggapan bahwa kebebasan orang lain merupakan neraka bagi kebebasan diri sendiri. Sartre berpendapat bahwa “awal mula kejatuhanku adalah kebebasan orang lain”. Hal ini karena kebebasan orang lain dianggapnya membatasi kebebasan individu yang sudah seharusnya bersifat mutlak. Hubungan antar individu dianggap sebagai sebuah konflik karena kebebasan orang lain merupakan sebuah ancaman bagi kebebasan diri. (Purnamasari, 2017) Konflik merupakan esensi hubungan antar dua individu yang “ada” berkesadaran. Siapa yang menjebak lebih awal dialah yang menang. Mungkin orang lain tidak mau dijadikan objek, tetapi bagi Sartre hal itu tidak mungkin. Pada saat dua individu bertemu, salah satu dari mereka kehilangan kepribadian. Karena dua “ada” yang memiliki kesadaran itu bebas, maka salah satunya mampu membebaskan diri dari tatapan orang lain dengan menatap kembali hingga terjadilah konflik. (Drs. H. Muzairi MA, 2002)

B. Eksistensi Manusia dalam Pancasila

Pancasila dalam prosesnya lahir melalui sejarah yang panjang. Lahirnya Pancasila didasarkan kepada sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta sejarah bangsa-bangsa lain. Pancasila bersumber dari kepribadian serta gagasan besar bangsa Indonesia sendiri serta diilhami oleh gagasan besar dunia. Soekarno mempunyai peran yang sangat vital dalam merumuskan dasar negara tersebut. Soekarno berhasil menyintesis beberapa pandangan yang diusulkan oleh beberapa tokoh. Soekarno juga merupakan orang pertama yang mengkonseptualkan dasar negara Indonesia tersebut kedalam pengertian “dasar falsafah” secara sistematis dan koheren. (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2020) Dalam pandangan Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua fundamental. Pertama, Ketuhanan yang maha Esa. Ini merupakan aspek undamental yang berkaitan dengan aspek moral. Kedua, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, serta keadilan sosial. Hal ini merupakan fundamental yang berkaitan dengan aspek-aspek politik. Dasar moral dan politik tersebut diharapkan dapat menguatkan pedoman kehidupan bangsa agar negara serta pemerintah mendapatkan dasar negara yang kokoh untuk memimpin pemerintahan berdasarkan aspek-aspek seperti kebaikan, keadilan serta persaudaraan. politik yang dijalankan pemerintah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan atas moralitas yang tinggi. (Soeprapto, 2013)

Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila didasarkan atas nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan secara tidak sengaja melekat pada nenek moyang kita terdahulu. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila tentu bukan hanya dipahami saja, tetapi harus dihayati serta diwujudkan dalam pengalamannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Nuraeni et al., 2017) pengalaman nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak usia sekolah dasar agar hal tersebut tertanam dalam diri tiap individu sedari mereka kecil. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diwarnai dengan ketegangan, konflik serta konsensus bersama. Keadaan bangsa Indonesia yang pada masa kolonialisme selalu ditempatkan sebagai pihak yang terkalahkan justru banyak menginspirasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kelemahan bangsa Indonesia terlihat ketika menghadapi penguasaan kolonial pada masa itu. Persatuan di antara rakyat Indonesia terlihat begitu lemah. Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa tentu memiliki banyak perbedaan juga didalamnya. Hal ini justru dimanfaatkan oleh penguasa kolonial yang menjadikan perbedaan tersebut sebagai media pemecah belah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia pada masa itu belum mempunyai kesadaran akan kesatuan mereka sebagai satu kesatuan bangsa yang terjajah. Beberapa tokoh perjuangan seperti Tan Malaka, Soekarno, dan Hatta melihat bahwa nasib rakyat sebagai satu kesatuan bangsa ini harus diperjuangkan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai simbol bangsa tentu bisa mengarahkan serta menggerakkan eksistensi manusia. Oleh karena itu, alasan kenapa perlu adanya Pancasila karena manusia -terhusus rakyat Indonesia- perlu adanya suatu simbol hidup yang berguna sebagai pengatur serta penggerak eksistensi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Manusia merupakan makhluk sosial. Keberadaan manusia tentu bersamaan dengan makhluk lain. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya eksistensi manusia keluar dari dirinya sendiri menuju kepada sesamanya. (Purwosaputro, 2015)

Dalam Pancasila sendiri terdapat lima rumusan sebagaimana berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila di atas merupakan dasar negara serta kesatuan nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lima dasar tersebut tetap eksis karena dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila tetap ada dan disepakati secara nasional. Pancasila merupakan pedoman kehidupan bagi bangsa, pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia. (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2020)

Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila relatif tetap. Nilai-nilai tersebut bersifat universal sehingga didalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tatanan praksis sosial seharusnya mengarah pada konstruksi tatanan sosial yang diidealkan sebagai “Manusia Pancasila”. Model sosial seperti ini membutuhkan wadah yang berupa pendidikan terkhusus pendidikan karakter sebagai penguat kesadaran kebangsaan serta menempatkan Pancasila sebagai Filsafat bangsa dalam upaya penguatan pendidikan karakter bangsa. Kodrat manusia sangat penting untuk memahami tentang Pancasila, maka Pancasila secara langsung juga sebangun dengan kodrat manusia yang tersusun atas tubuh, jiwa sebagai suatu kesatuan, sifat individual dan sosial sebagai kesatuan, serta memiliki kehendak bebas sekaligus sebagai terikat oleh aspek ketuhanan yang mengikat. Maka dengan itu, bisa dikatakan bahwa Pancasila mempunyai dasar kesatuan berupa dua sidat kodrat manusia yang tidak saling mendemarkasi dengan ketat yang disebut dengan monodualis. Konsep inilah yang menjadi pijakan ontologis di dalam memahami dan mengontekstualkan Pancasila sebagai modal implementasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan Pancasila dalam praksis sosial seharusnya diarahkan menuju konstruksi model sosial dalam menyikapi persoalan sosial yang ditangkap sebagai sebuah permasalahan kolektif. Model sosial mempunyai makna kerangka pikir yang dijadikan sebagai dasar dalam praksis sosial. Dalam ruang lingkup negara Indonesia, model sosial diidealkan melalui pelibatan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan fundamental. Yang dimaksud disini merupakan model “Manusia Pancasila”. Manusia Pancasila bukan merupakan murni sebagai seorang individu, tetapi juga merepresentasikan satu kesatuan bangsa Indonesia sebagai identitas kolektif yang diikat oleh cita-cita bersama agar dapat tercapai keadaan adil dan makmur. Tujuan adil dan makmur menuntut adanya persyaratan badaniah dan ruhaniah serta meteril dan spiritualitas mental. Hal-hal tersebut sebenarnya sudah ada pada hati setiap manusia terkhusus rakyat Indonesia. Masyarakat Adil dan makmur sebenarnya sudah ada dan berkobar menjadi keyakinan bangsa Indonesia selama beratus-ratus tahun yang lalu seperti yang telah tertuang pada pepatah Jawa seperti “Gemah ripah loh jinawi dan tata tentrem kerta rahaja”

Manusia sebagai subjek tidak berdiri sendiri, keberadaannya bersamaan dengan subjek eksistensi lainnya. Ketidakeperfeksian manusia itu menunjukkan bahwa eksistensi manusia tidaklah eksistensi secara total. Manusia selalu ada dalam bentuk situasi eksistensi yang terbatas. Eksistensi yang terbatas itu membuat manusia berada pada posisi kegelisahan terhadap masa depan. Struktur kenyataan dalam Pancasila berpusat pada eksistensi manusia. Situasi batas eksistensi manusia mencakup eksistensi manusia dalam konteks Pancasila sekaligus Pancasila dalam konteks eksistensi. Manusia Pancasila yang merujuk pada konsep monodualis Notonegoro meliputi dualitas badan serta jiwa, individu dan sosial, serta kebebasan dan kebutuhannya. Kesadaran sebagai outcome dari implementasi Pancasila adalah manusia Indonesia yang sadar akan tantangan, ancaman, dan permasalahan bangsa, baik dalam hal moral, politik maupun sosial. Hal ini yang membedakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai falsafah hidup dan digerakan oleh ideologi Pancasila dengan bangsa lain yang digerakan oleh ideologi seperti komunisme dan sosialisme dimana otonomi individu ditanggihkan kepada kekuasaan Negara. (Khasri, 2021).

C. Pancasila dari sudut pandangan eksistensialisme Sartre

Pada pembahasan artikel ini dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila, pembahasan akan lebih ditekankan pada sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Hal ini karena pada sila kedua tersebut nilai kemanusiaan terletak pada sifat adil dan beradab yang mana hal tersebut tidak jauh dari pembahasan mengenai eksistensi manusia, mengenai keberadaan manusia. Kata “kemanusiaan” pada sila kedua berasal dari kata “manusia”. Manusia memiliki arti sebagai makhluk berbudaya yang memiliki potensi berpikir, rasa, cipta. Karena potensi yang dimiliki tersebut, manusia memiliki martabat yang tinggi dibanding makhluk lain. Dengan budi nurani tersebut, manusia menyadari akan nilai dan norma dalam kehidupannya. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat khas yang dimiliki manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti patut, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran. Tindakan yang dilakukan didasarkan atas objektivitas bukan subjektivitas. Sedangkan beradab sendiri berasal dari kata “Adab”, yang mempunyai arti sopan, berbudi luhur, susila. Keputusan serta tindakan manusia selalu didasarkan akan nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terkhusus mengandung makna kesopanan atau moral. Dengan demikian beradab berarti manusia hidup berdasar nilai kesusilaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Eksistensialisme menentang objektivitas serta impersonalitas. Hal ini karena apabila kehidupan manusia diinterpretasikan secara lebih objektif serta impersonal, maka kehidupan manusia menjadi lebih dangkal serta tidak mempunyai makna. Penekanan terhadap eksistensi diri dan subjektivitas berhasil membawa kesadaran akan

pentingnya kemerdekaan serta rasa tanggung jawab. Eksistensialisme memperlihatkan kembali pembahasan-pembahasan mengenai individualitas serta personalitas manusia. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki kesadaran langsung sebagai subjek yang menemukan arti kehidupannya. Hal ini yang selalu ditekankan oleh para eksistensialis. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu kesadaran akan sikap serta perbuatan sebagai manusia. Hal ini didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani manusia baik terhadap diri kita pribadi maupun sesama makhluk lainnya. Potensi tersebut dimiliki oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Setiap manusia harus dihadapi sesuai nilai-nilai kemanusiaan. (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2020). Sebagai makhluk yang berpikir, manusia seharusnya sadar akan potensi akan budi dan nurani yang dimiliki setiap insan manusia.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila terkhusus sila kedua mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, cinta mencintai, hormat menghormati, toleransi, gotong royong, serta keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Nilai kemanusiaan yang adil memuat nilai-nilai hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya serta beradab harus mempunyai jiwa keadilan. Hal ini berarti hakikat manusia harus adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap sesama manusia, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta adil terhadap lingkungan sekitar. (Juniarti et al., 2021). Manusia sebagai makhluk sosial berhak mendapatkan keadilan untuk diri sendiri, tetapi ia juga harus berlaku adil terhadap manusia lain sebagai bentuk tanggung jawab atas kehidupan sosialnya. Agar masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud, masyarakat Indonesia perlu secara terus menerus mewarisi serta mengembangkan nilai-nilai budi luhur yang bersumber dari sifat religius. Eksistensi Tuhan oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai istilah serta ajaran toleransi terhadap segala perbedaan sikap yang berasal dari setiap individu yang telah dijunjung tinggi oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu di Nusantara. Berbagai nilai tersebut mulai digagas oleh beberapa tokoh pergerakan nasional pada masa itu. Pada saat Soekarno merumuskan dasar negara yang ditawarkan pada sidang BPUPKI, saat itu hadirin tidak ada yang menolak. Berbagai nilai luhur tersebut ada dan hidup dikalangan masyarakat Nusantara serta diperkata dengan pemikiran dunia yang lebih kodern. Jika dilihat dari sudut pandang eksistensialisme Jean-Paul Sartre, sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” mempunyai arti yang berlawanan dengan prinsip eksistensialisme Sartre. Hal ini karena dalam makna sila kedua Pancasila, tujuan dari sila tersebut terletak pada bagaimana hubungan antar manusia, hubungan antar individu sehingga memperoleh keadilan serta tumbuh sikap saling menghormati dikalangan masyarakat. Hal ini justru bertolak belakang dengan pandangan eksistensialisme Sartre. Sartre berpandangan bahwa manusia lahir ke dunia secara tidak sengaja tanpa mempunyai pilihan untuk dilahirkan.

Manusia merupakan sebuah kebebasan, bahkan dalam pandangan Sartre keberadaan Tuhan justru membunuh kebebasan manusia. Begitu pun keberadaan individu lain, Sartre berpandangan bahwa keberadaan individu lain justru hanya menimbulkan konflik, hal ini karena kebebasan individu lain membatasi kebebasan manusia yang mutlak. Oleh karena itu kebebasan individu lain dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan diri. Manusia merupakan kebebasan yang eksistensinya mendahului esensi. Dengan kebebasan tersebut, manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi baik di dalam maupun di luar dirinya. Keberadaan dua orang individu hanya menimbulkan konflik karena tidak mungkin ada dua kebebasan sekaligus dalam interaksi antar dua manusia. Jika dilihat dari sudut pandang Sartre yang hidup pada masa yang menganggap percaya kepada Tuhan berarti tunduk sepenuhnya terhadap kebijakan gereja yang pada masa itu membelenggu kebebasan yang dimiliki manusia dengan dogma-dogma keagamaannya, Maka eksistensi Tuhan-jika kita berkaca pada Sartre- telah membunuh kebebasan manusia yang merupakan eksistensinya sebagai manusia. Setiap orang punya kebebasan yang berarti dirinya bukan berawal dari Tuhan. Jika manusia memiliki ketergantungan pada Tuhan, maka manusia tersebut tidak mempunyai kebebasan. Sehingga dalam sudut pandang Sartre, syarat kebebasan manusia sebagai makhluk adalah tidak adanya Tuhan

Jika kita amati dikalangan masyarakat Indonesia, pandangan ini cenderung berbahaya jika disampaikan. Hal ini karena tentu pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia secara umum. Jika kita ambil pandangan Sartre untuk melihat eksistensi manusia dalam Pancasila maka pandangan tersebut akan bertentangan. Hal ini karena Sartre melihat bahwa eksistensi makhluk lain justru sebagai ancaman terhadap eksistensi diri sendiri. Ini tentu bertolak belakang dengan pandangan Pancasila, terutama sila kedua. Pada sila kedua Pancasila, justru syarat manusia dapat dikatakan bereksistensi adalah jika manusia tersebut berlaku adil serta bermoral yang tentu saja kedua hal tersebut -adil dan bermoral- tentu membutuhkan keberadaan makhluk lain sebagai sebuah eksistensi. Artikel ini bukan bertujuan untuk menolak sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Artikel ini bertujuan sebagai pembandingan antara eksistensi manusia dari kacamata Sartre dengan eksistensi manusia dalam Pancasila. Perbedaan terlihat dengan jelas antara eksistensi manusia dalam sudut pandangan Sartre dan eksistensi manusia dalam Pancasila. Namun perbedaan ini justru dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat apakah eksistensi manusia yang jika didasarkan kepada Pancasila, apakah manusia tersebut memiliki kebebasan atau justru manusia tersebut kehilangan eksistensinya.

4. CONCLUSION

Pancasila merupakan dasar bagi negara kesatuan republik Indonesia. Keberadaan Pancasila bisa mengarahkan dan menggerakkan manusia. Hal ini tentu karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat seluruh rakyat Indonesia, selain itu Pancasila juga dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kehidupan serta nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Pancasila tetap eksis hingga saat ini

Pada pembahasan sila kedua pancasila yang berbunyi *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, eksistensi manusia dinilai atas bagaimana interaksinya dengan sesama. Manusia dinilai atas keadilan dan sikap moral antar individu. Dalam sudut pandang Sartre, interaksi antar individu justru hanya menimbulkan konflik antara kedua pihak. Hal ini karena kebebasan individu lain justru hanya membatasi kebebasan diri sendiri, dan tidak mungkin ada dua kebebasan sekaligus dalam sebuah interaksi antar dua individu. Salah satu individu pasti akan menjadi objek dari individu lainnya.

REFERENCES

- Drs. H. Muzairi MA. (2002). *EKSISTENSIALISME JEAN PAUL SARTE Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia* (Z. A. Thoha, H. el Jaid, & B. B. Atijah (eds.)). PUSTAKA BELAJAR (Anggota IKAPI).
- Juniarti, I. G., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua pancasila terhadap kehidupan bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 7273–7277. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2139>
- Khasri, M. R. K. (2021). Pancasila Dalam Praksis Sosial: “Manusia Pancasila” Menjawab Permasalahan Masyarakat Digital. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 86–97. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.5>
- Lavine, T. . (2020). *From Socrates To Sartre, the Philosophic Quest* Batam Books, Inc, New York, 1984 (A. Iswanto, D. A. Utama, T. T. T. Kirana, & Werdiantoro (eds.)). Immortal Publishing dan Octopus.
- Lutfi, M. (2023). Eksistensi Manusia dalam Pandangan Jean Paul Sartre dan Sayyed Hossein Nasr. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 162–169.
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P., Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 2–6. http://ilib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. (2020). *Empat Pilar MPR RI*.
- Purnamasari, E. (2017). (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Jean Paul Sartre). *Manthiq*, 2(2), 119–133.
- Purwosaputro, S. (2015). “ Aku ” Dalam Pancasila (Refleksi Metafisika Pancasila). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1), 692–703.
- Soeprapto, S. (2013). Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Fisapat*, 23(2), 100–116.
- Tambunan, S. F. (2016). Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(2), 215–232. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/412/304>